



**KESEPAKATAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
PUSAT STUDI BENCANA (PSBA)
UNIVERSITAS GADJAH MADA
TENTANG**



**PROGRAM KOLABORASI PEMBELAJARAN, PENELITIAN, PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT DAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH BERSAMA**

NOMOR: 6.10.1/UN32.7/KS/2023
NOMOR: 179/UN1/PSBA/PM/2023

Pada hari ini Jumat tanggal Enam bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (06-10-2023) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Ari Sapto, M.Hum, Dekan Fakultas Ilmu Sosial**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr.rer.nat Muhammad Anggri Setiawan, M.Si**, Kepala Pusat Studi Bencana Universitas Gadjah Mada, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Studi Bencana Universitas Gadjah Mada, berkedudukan di Jalan Mahoni C 16, Bulaksumur, Yogyakarta selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Fakultas Ilmu Sosial yang berada di Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang, Tanggal 17 Agustus 2009, Nomor 0487/KEP/H32/OT/2009, tentang Pendirian Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pusat Studi Bencana (PSBA) Universitas Gadjah Mada berdasarkan dengan surat Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada No. UGM/89/3969/UM/01/37 Tanggal 12 Juli 1995 tentang Pusat Studi Bencana Alam dan Surat Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada No. 96/P/SK/HKTL/2001 Tanggal 22 Oktober 2001 tentang Perubahan Nama Pusat Studi Bencana Alam menjadi Pusat Studi Bencana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Gadjah Mada.

-1-

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua




bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerja sama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang dengan Pusat Studi Bencana (PSBA) Universitas Gadjah Mada tentang Program Pembelajaran, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Publikasi Karya Ilmiah Bersama, yang dapat menunjang terlaksananya pencapaian Indikator Pencapaian Kinerja Utama (IKU PT).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja sama tentang Program Program Pembelajaran, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Publikasi Karya Ilmiah Bersama, (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Program Pembelajaran kegiatan yang memberikan kesempatan untuk mengirimkan dan menerima dosen serta mahasiswa untuk mengajar atau belajar selama periode tertentu di perguruan tinggi mitra. Serta mengimplementasikan kurikulum yang disepakati bersama agar memenuhi standar kedua institusi.
- (2) Program Penelitian, melakukan penelitian bersama di antara dosen atau peneliti dari kedua perguruan tinggi. Berbagi basis data, literatur, atau sumber daya penelitian lainnya. Pemberian Subsidi atau sharing dana untuk mendukung proyek penelitian bersama.
- (3) Program Pengabdian Kepada Masyarakat, melakukan kegiatan pelayanan atau pengabdian kepada komunitas dengan sumber daya gabungan dari kedua institusi. Mengadakan pelatihan atau workshop untuk masyarakat dengan memanfaatkan keahlian dari kedua perguruan tinggi dan meningkatkan kesejahteraan atau kapabilitas masyarakat tertentu.
- (4) Program Publikasi Karya Ilmiah Bersama, menghasilkan artikel, jurnal, atau buku dengan penulis dari kedua perguruan tinggi. Mengadakan atau berpartisipasi dalam konferensi ilmiah dengan sumber daya dan expertise dari kedua institusi. Memanfaatkan platform publikasi yang dikurasi bersama untuk mempromosikan karya-karya ilmiah dari kedua institusi.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian** ini mencakup :

- (1) Program Pembelajaran melibatkan Prodi S1 Geografi, Prodi S1- S3 Pendidikan Geografi, Prodi S1 Ilmu Sejarah, Prodi S1 Pendidikan Sejarah, Prodi S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Prodi S1 Pendidikan Sosiologi dan Prodi S1 Ilmu Komunikasi dengan koordinator dari **PIHAK KESATU** Syamsul Bachri, S.Si., M.Sc., P.hD (syamsul.bachri.fis@um.ac.id) dan Koordinator dari **PIHAK KEDUA** Dr. Indranova Suhendro, S.T., M.Sc. (indranova.suhendro@ugm.ac.id).

- (2) Program Penelitian melibatkan Prodi S1 Geografi, Prodi S1- S3 Pendidikan Geografi, Prodi S1 Ilmu Sejarah, Prodi S1 Pendidikan Sejarah, Prodi S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Prodi S1 Pendidikan Sosiologi dan Prodi S1 Ilmu Komunikasi dengan **PIHAK KESATU** Syamsul Bachri, S.Si., M.Sc., P.hD (syamsul.bachri.fis@um.ac.id) dan Koordinator dari **PIHAK KEDUA** Dr. Muhammad Ngainul Malawani, M.Sc. (m.ngainul.m@mail.ugm.ac.id).
- (3) Program Pengabdian Kepada Masyarakat, melibatkan seluruh SDM **PARA PIHAK** dan mahasiswa, dengan koordinator dari **PIHAK KESATU** Syamsul Bachri, S.Si., M.Sc., P.hD (syamsul.bachri.fis@um.ac.id) dan Koordinator dari **PIHAK KEDUA** Dr. Nugroho Christanto, M.Si.(n.christanto@ugm.ac.id).
- (4) Program Publikasi Karya Ilmiah Bersama, Melibatkan pengelolaan jurnal dari Fakultas Ilmu Sosial dengan koordinator dari **PIHAK KESATU** Dr. Heni Masruroh, M.Si (heni.masruroh.fis@um.ac.id) dan Koordinator dari **PIHAK KEDUA** Bondan Galih Dewanto, S.T., M.S (bondan.g.d@ugm.ac.id).

PASAL 3 TUJUAN

Perjanjian ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PARA PIHAK** berkewajiban mensukseskan kegiatan dengan mengoptimalkan penggunaan secara bersama sumber daya yang dimiliki masing-masing **PIHAK**, dan dapat dipertanggung-jawabkan sesuai kemampuan masing-masing.
- (2) **PARA PIHAK** berkewajiban saling membantu dalam rangka melakukan monitoring (pengawasan) dan evaluasi sesuai dengan peranan masing-masing dalam kegiatan kerja sama.
- (3) Hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah:
 - a. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan dukungan operasional kegiatan atas persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.
 - b. Kewajiban **PIHAK PERTAMA** menyiapkan/menugaskan tenaga ahli/staf dosen yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan kerja sama ini.
- (4) Hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah:
 - a. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan sumber daya manusia yang tidak bermasalah secara akademik dan non akademik dari **PIHAK PERTAMA**.
 - b. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan tenaga ahli/staf dosen dari **PIHAK PERTAMA** dengan kualifikasi yang diperlukan dalam menunjang kegiatan.
 - c. **PIHAK KEDUA** berhak menentukan dan menempatkan mahasiswa (jika terlibat) sesuai dengan keahliannya sesuai dengan nama yang telah direkomendasikan **PIHAK PERTAMA**.

- d. Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah melakukan komunikasi tentang rencana kegiatan, mendistribusikan tugas atau peranan **PARA PIHAK** dalam kegiatan, serta ikut melakukan rapat atau pertemuan atau kordinasi jika diperlukan.

PARA PIHAK menyetujui bahwa untuk kegiatan sebagaimana disebut pada pasal 2 ayat (2), hak dan kewajiban yang mengatur peranan **PARA PIHAK** akan dibicarakan sesuai kesepakatan

PASAL 5 **JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah durasi 5 tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6 **BIAYA KEGIATAN**

- (1) Komponen biaya secara langsung disalurkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** yang rinciannya dijelaskan dalam RAB.
- (2) **PIHAK KESATU** tidak bertanggung jawab untuk menanggung biaya-biaya lain selain biaya yang sudah disepakati di dalam RAB sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya melebihi durasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 5.
- (4) Pembayaran dilakukan secara bertahap dibagi dalam termin sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (5) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya yang masih tersisa apabila terdapat kondisi sebagai berikut :
 - a. Tagihan dan Laporan tidak disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**.
 - b. Kegiatan yang telah dianggarkan tidak dilaksanakan.

PASAL 7 **PELAKSANAAN KERJASAMA**

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan perjanjian kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** menawarkan turunan program kepada **PIHAK KESATU**;
- (4) **PIHAK KEDUA** dapat menyampaikan konsep RAB kepada **PIHAK KESATU**;
- (5) **PIHAK KESATU** melakukan verifikasi konsep RAB dari **PIHAK KEDUA**;
- (6) **PARA PIHAK** dapat merevisi konsep RAB berdasarkan hasil verifikasi;
- (7) **PARA PIHAK** menandatangani RAB yang telah disepakati untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penagihan dan pembayaran;
- (8) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 8
KORESPONDENSI

- (1) Dalam pelaksanaan kerja sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk satu orang wakil sebagai koordinator kegiatan untuk mengkoordinir pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA : **Koordinator Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang**

Nama : Alfyananda Kurnia Putra, S.Pd., M.Pd
Alamat : UM, Jl. Semarang No 5 Kota Malang
Telepon : 085 755 9000 028
Email : alfyananda.fis@um.ac.id

PIHAK KEDUA : **Pusat Studi Bencana Universitas Gadjah Mada**

Nama : Dr.rer.nat Muhammad Anggri S, M.Si
Alamat : UGM, Jl. Mahoni C 16 Bulaksumur, Yogyakarta.
Telepon : 0813 9270 5045
Email : anggri@ugm.ac.id

PASAL 9
FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 11

-5-

Paraf Pihak Kesatu



Paraf Pihak Kedua



PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 13

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Malang



Dr. Ari Sapto, M.Hum
NIP. 196212041987011001

PIHAK KESATU

Ketua Pusat Studi Bencana
Universitas Gadjah Mada



Dr.rer.nat Muhammad Anggri S, M.Si
NIP. 198306192008011008

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua